

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG KESEHATAN



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SINTANG**

2025

KATA PENGANTAR

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa Daerah berkewajiban menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menyampaikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran tersebut berakhir kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 ini tersusun atas kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Sintang, 28. Januari 2026

4 Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sintang



dr. Rosa Trifina, MPH
Pembina Tk. I/IV,b
NIP. 197008282002122006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum	3
D. Arah Kebijakan	4
Bab II. Penerapan SPM	5
A. Pengumpulan Data	5
B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	7
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	16
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	18
Bab III. Pencapaian SPM	19
A. Jenis Pelayanan Dasar	19
B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	19
C. Anggaran	21
D. Dukungan Personil	22
E. Hasil Capaian	22
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi	24
Bab IV. Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	28
Bab V. Penutup	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. SPM ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkeadilan, serta menjadi pedoman minimal yang harus dicapai oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan SPM bidang kesehatan memerlukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Evaluasi terhadap capaian SPM bidang kesehatan menjadi penting untuk menilai tingkat pencapaian indikator pelayanan dasar, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi SPM diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Secara normatif, pelaksanaan dan evaluasi SPM bidang kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dengan dilaksanakannya evaluasi SPM secara berkala, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

1. MAKSUD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun

terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Sintang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan maksud peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :

- a. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

2. TUJUAN

Penerapan SPM ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam Penerapan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sintang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. KEBIJAKAN UMUM

Visi Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas Dan Berkelanjutan”. Kemudian misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode 2025-2029. Adapun misi pembangunan yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang.
- Misi 2 : Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
- Misi 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan **Kesehatan**, Tenaga Kerja yang Trampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kolaboratif.
- Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan terdapat pada Misi 3 RPJMD periode 2025-2029.

D. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan berkeadilan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang berorientasi pada pemenuhan indikator SPM
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar.
4. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pemenuhan SPM bidang kesehatan secara terintegrasi dan berkelanjutan
5. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sintang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kab. Sintang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
6. SPM sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sehingga dalam implementasinya harus termuat dalam rumusan program pembangunan RPJMD Kab. Sintang tahun 2025-2029, sebagai upaya untuk mewujudkan Kab. Sintang yang sehat. Arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Sintang difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar diseluruh wilayah kecamatan serta khususnya diwilayah perbatasan, pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dengan lingkungan.

BAB II

PENERAPAN SPM

A. PENGUMPULAN DATA

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFeksi HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Serawai	Serawai	493	489	471	2381	889	13315	1533	3284	77	33	6410	12090
2	Ambalau	Kemangai	290	288	278	1403	524	8436	904	2512	80	31		
3	Kayan Hulu	Tebidah	495	491	473	2389	892	13365	1539	4299	82	123		
4	Sepauk	Sepauk	1057	1048	1010	5089	1906	16985	3287	3218	89	41		
5	Tempunak	Tempunak	382	379	365	1843	688	11083	1187	3309	65	21		
		Jelimpau	228	226	218	1101	411	6621	709	1964	80	112		
6	Sei. Tebelian	Pandan	661	656	632	2989	1192	18424	2056	5756	75	40		
7	Sintang	Sungai Durian	555	550	530	2679	1000	16106	1725	4822	84	28		
		Tanjung Puri	609	605	582	2844	1099	17699	1896	5305	82	33		
		Dara Juanti	212	210	203	1024	383	6229	660	1825	93	22		
8	Dedai	Dedai	401	398	383	1837	723	11646	1247	3479	65	45		
		Emparu	224	222	214	1081	404	6502	696	1929	90	20		
9	Kayan Hilir	Nanga Mau	553	549	528	2570	997	16054	1720	4808	77	59		
10	Kelam Permai	Kebong	267	264	255	1287	481	7739	829	2301	71	14		
		Nanga Lebang	79	79	76	384	143	2306	247	663	85	9		
11	Binjai Hulu	Mensiku	258	256	247	1248	466	7503	804	2230	80	15		
12	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	253	251	241	1220	456	7355	786	2180	76	26		
		Serangas	214	212	204	1033	386	6210	665	1841	69	4		
13	Ketungau Tengah	Merakai	624	619	596	2876	1125	18117	1941	5429	68	33		
14	Ketungau Hulu	Senaning	449	445	429	2167	809	13030	1396	3846	67	6		
	Jumlah		8301	8238	7934	39447	14973	228806	25824	65000	1959	716	6410	12090

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2025

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA					
NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	SERAWAI	Puskesmas: 1 Pustu: 5 Poskesdes: 18	Puskesmas: 1 Pustu: 5 Poskesdes: 18	Dokter : 1 Perawat : 36 Bidan : 17	Dokter : 1 Perawat : 36 Bidan : 17
2	AMBALAU	Puskesmas: 1 Pustu: 11 Poskesdes: 4	Puskesmas: 1 Pustu: 11 Poskesdes: 4	Dokter : 1 Perawat : 22 Bidan : 21	Dokter : 1 Perawat : 22 Bidan : 21
3	KAYAN HULU	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 16	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 16	Dokter : 1 Perawat : 35 Bidan : 27	Dokter : 1 Perawat : 35 Bidan : 27
4	SEPAUK	Puskesmas: 1 Pustu: 14 Poskesdes: 9	Puskesmas: 1 Pustu: 14 Poskesdes: 9	Dokter : 2 Perawat : 51 Bidan : 57	Dokter : 2 Perawat : 51 Bidan : 57
5	TEMPUNAK	Puskesmas: 2 Pustu: 5 Poskesdes: 9	Puskesmas: 2 Pustu: 5 Poskesdes: 9	Dokter : 2 Perawat : 56 Bidan : 44	Dokter : 2 Perawat : 56 Bidan : 44
6	SEL TEBELIAN	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Dokter : 2 Perawat : 41 Bidan : 29	Dokter : 2 Perawat : 41 Bidan : 29
7	SINTANG	Puskesmas: 3 Pustu: 1 Poskesdes: 6	Puskesmas: 3 Pustu: 1 Poskesdes: 6	Dokter : 17 Perawat : 76 Bidan : 63	Dokter : 17 Perawat : 76 Bidan : 63
8	DEDAI	Puskesmas: 2 Pustu: 7 Poskesdes: 11	Puskesmas: 2 Pustu: 7 Poskesdes: 11	Dokter : 3 Perawat : 62 Bidan : 33	Dokter : 3 Perawat : 62 Bidan : 33
9	KAYAN HILIR	Puskesmas: 1 Pustu: 7 Poskesdes: 14	Puskesmas: 1 Pustu: 7 Poskesdes: 14	Dokter : 2 Perawat : 47 Bidan : 32	Dokter : 2 Perawat : 47 Bidan : 32
10	KELAM PERMAI	Puskesmas: 2 Pustu: 6 Poskesdes: 11	Puskesmas: 2 Pustu: 6 Poskesdes: 11	Dokter : 5 Perawat : 57 Bidan : 37	Dokter : 5 Perawat : 57 Bidan : 37
11	BINJAI HULU	Puskesmas: 1 Pustu: 2 Poskesdes: 3	Puskesmas: 1 Pustu: 2 Poskesdes: 3	Dokter : 1 Perawat : 28 Bidan : 17	Dokter : 1 Perawat : 28 Bidan : 17
12	KETUNGAU HILIR	Puskesmas: 2 Pustu: 8 Poskesdes: 7	Puskesmas: 2 Pustu: 8 Poskesdes: 7	Dokter : 3 Perawat : 50 Bidan : 29	Dokter : 3 Perawat : 50 Bidan : 29
13	KETUNGAU TENGAH	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Dokter : 3 Perawat : 57 Bidan : 36	Dokter : 3 Perawat : 57 Bidan : 36
14	KETUNGAU HULU	Puskesmas: 1 Pustu: 10 Poskesdes: 8	Puskesmas: 1 Pustu: 10 Poskesdes: 8	Dokter : 2 Perawat : 42 Bidan : 30	Dokter : 2 Perawat : 42 Bidan : 30

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2025

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	7120	7120		18128	129.071.360	
		2 . Tablet tambah darah	1712800	1712800		255	436.764.000	
		3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	8301	8301				
		4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	8301	8301		5880	48.809.880	
		5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	8301	8301		90888/botol/10	79.436.112	
		6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	8301	8301			~	
		7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	8301	8301		800	6.640.800	
		8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8301	8301		25000	207.525.000	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 . Formulir Partograf	8238	8238		800	6.590.400	
		2 . Kartu ibu (rekam medis)	8238	8238		800	6.590.400	

		3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8238	8238		25000		Sudah termasuk dalam pelayanan kesehatan ibu hamil
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 . Vaksin Hepatitis B0	3951	3951			~	
		2 . Vitamin K1 injeksi	2000	2000		781	1.562.000	
		3 . Salep/tetes mata antibiotik	1560	1560		4200	6.552.000	
		4 . Formulir bayi baru lahir	7934	7934		800	6.347.200	
		5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	7934	7934		800	6.347.200	
		6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7934	7934		25000		Sudah termasuk dalam pelayanan kesehatan ibu hamil
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	39447	39447		2500	98.617.500	
		2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	39447	39447		2500	98.617.500	

		3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	39447	39447		25000		Sudah termasuk dalam pelayanan kesehatan ibu hamil
		4 . Vitamin A Biru	17700	17700		15250/botol/50	976.000	
		5 . Vitamin A Merah	180800	180800		15250/boto/50	6.039.000	
		7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	28160	28160		88288/vial/20	131.990.560	
		8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	27130	27130		21810/vial/10	65.211.900	
		9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	12310	12310		158500/vial/10	473.915.000	
		10 . Vaksin imunisasi dasar: DTP - HB -Hib	19000	19000		85876/vial/10	256.769.240	
		11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	17420	17420			~	
		13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	19000	19000		85876/vial/10	256.769.240	
		14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-rubella	17420	17420			~	
		16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	48900	48900		5000	244.500.000	

		17 . Peralatan Anafilaktik	20	0			~	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1 . Buku raport kesehatanku	11806	11806		25000	295.150.000	
		2 . Buku pemantauan kesehatan	11806	11806		25000	295.150.000	
		3 . Kuesioner skrining kesehatan	11806	11806		800	9.444.800	
		4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	11806	11806		800	9.444.800	
		5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	11806	11806		800	9.444.800	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1 . Pedoman dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	20	20		10000/KIE		
		2 . Alat ukur berat badan	20	20		358.500,00	7.170.000	
		3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	20	20			~	
		4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	20	20			~	
		5 . Alat : Tensimeter	20	20		330.000,00	6.600.000	
		6 . Alat : Glukometer	20	20			~	
		7 . Alat : Tes strip gula darah	228806	228806		169000/botol/100	379.912.000	

		8 . Alat : Lancet	228806	228806			~	
		9 . Alat : Kapas alkohol	228806	228806		15600/500gr/ 50		
		10 . Alat : KIT IVA Tes	228806	228806			~	
		11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20			~	Aplikasi SIPTM
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah kolesterol	41424	41424		169000/botol/ 100	64.389.000	
		2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS) Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	20	20			~	
		3 . Buku kesehatan lansia	41424	41424		25000	1.035.600.000	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	20	20		10000/KIE		
		2 . Tensimeter	20	20		330.000,00	6.600.000	
		3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20			~	Aplikasi SIPTM

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1 . Alat : Glukometer	20	20			~	
		2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	1959	1959		169000/botol/100	3.380.000	
		3 . Alat : Kapas Alkohol	1959	1959		15600/500gr		
		4 . Alat : Lancet	1959	1959		17252/box/200	345.040	
		5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20			~	Aplikasi SIPTM
		6 . Pedoman dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	20	20		10000/kie		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	21	21		25000	525.000	
		2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	20	20			~	
		3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	20	20				
		4 . Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	20	20		10000/kie		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 . Media KIE (Leaflet Lembar Balik Poster Banner)	23	23		10000/kie		

		2 . Reagen Zn TB	250	250		172527/kit/orang s/d selesai pengobatan		
		3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	6410	6410		150000/kotak/10		
		4 . Pot dahak Kaca slide Bahan Habis Pakai (Oil Emersi Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen Ose/Lidi) Rak pengering	6410	6410			~	
		5 . Catridge tes cepat molekuler	4800	4800		163100	782.880.000	
		6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	23	23				
		7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	23	23		25000	575.000	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1 . Media KIE (Lembar Balik Leaflet Poster Banner)	23	23		10000/kie		
		2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	4350	4350		8391	36.500.850	
		3 . Bahan Medis Habis Pakai Handschoen Alkohol Swab Plester Lancet/Jarum Steril Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	21	21			~	

		4 . Alat tulis Rekam medis yang berisi nomor rekam medis Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana Nomor KTP/NIK	12090	12090		800	9.672.000	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2025

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA SINTANG

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter, Bidan, Perawat	Bidan : 21 Dokter : 21 Perawat : 42	Bidan : 21 Dokter : 21 Perawat : 42	-	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter, Bidan, Perawat	Bidan : 21 Dokter : 21 Perawat : 42	Bidan : 21 Dokter : 21 Perawat : 42	-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter, Bidan, Perawat	Bidan : 21 Dokter : 21 Perawat : 42	Bidan : 21 Dokter : 21 Perawat : 42	-	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi : 20 Guru Paud: 20 Kader Kesehatan: 20	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi : 20 Guru Paud: 20 Kader Kesehatan: 20	-	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 20 Dokter/Dokter Gigi : 9 Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Guru: 20 Kader kesehatan: 20	Bidan : 20 Dokter/Dokter Gigi : 9 Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Guru: 20 Kader kesehatan: 20	-	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Non-Kes terlatih: 20	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32 Non-Kes terlatih: 20	-	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 20 Dokter: 20 Perawat: 40 Non-Kesehatan Terlatih: 20	Bidan : 20 Dokter: 20 Perawat: 40 Non-Kesehatan Terlatih: 20	-	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Kesmas: 32	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Kesmas: 32	-	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32	Bidan : 20 Dokter : 20 Perawat : 40 Ahli gizi: 20 Kesmas: 32	-	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter, Perawat	Dokter/perawat terlatih jiwa/tenaga kesehatan lainnya: 20	Dokter/perawat terlatih jiwa/tenaga kesehatan lainnya: 20	-	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	dokter, perawat, ATLM, Analis, Kesmas Tenaga Kesehatan/Non terlatih	Dokter: 20 Perawat: 40 ATLM: 32 Penata Rontgen: 1 Kesmas: 32 Tenaga Non-kes terlatih: 21	Dokter: 20 Perawat: 40 ATLM: 32 Penata Rontgen: 1 Kesmas: 32 Tenaga Non-kes terlatih: 21	-	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	dokter, perawat, ATLM, Analis, Kesmas Tenaga Kesehatan/Non terlatih	Dokter: 22 Perawat: 42 Bidan: 22 ATLM: 34 Kesmas: 34 Non-kes terlatih: 11	Dokter: 22 Perawat: 42 Bidan: 22 ATLM: 34 Kesmas: 34 Non-kes terlatih: 11	-	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2025

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : SINTANG

NO.	KODE)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1	02				Urusan pemerintahan bidang kesehatan			393.484.258.266		403.321.364.723		413.404.398.841		423.739.508.812		434.332.996.532		434.332.996.532	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		179.920.076.510		184.418.078.423		189.028.530.383		193.754.243.643		198.598.099.734		198.598.099.734	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas		190.036.301.256		194.787.208.787		199.656.889.007		204.548.311.232		209.764.519.013		209.764.519.013	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga medis per-satuan penduduk		22.986.010.500		23.560.660.763		24.149.677.282		24.753.419.214		25.372.254.694		25.372.254.694	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2	4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentasi apotek, toko obat alkes, UMOT dan optik yang berizin		168.701.000		172.918.525		177.241.488		181.672.525		186.214.338		186.214.338	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga aktif		373.168.000		382.498.225		392.060.681		401.862.198		411.908.753		411.908.753	Dinas Kesehatan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : SINTANG

N O.	KODE)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
	1	02	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			300,00		330,00		363,00		399,30		439,23		439,23		
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			3000,00		3300,00		3630,00		3993,00		4392,30		4392,30		
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			150,00		165,00		181,50		199,65		219,62		219,62		
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			100,00		110,00		121,00		133,10		146,41		146,41		
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			82,00		90,20		99,22		109,14		120,06		120,06		
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			130,00		143,00		157,30		173,03		190,33		190,33		
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100,00		110,00		121,00		133,10		146,41		146,41		
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			80,00		88,00		96,80		106,48		117,13		117,13		
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			80,00		88,00		96,80		106,48		117,13		117,13		
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			150,00		165,00		181,50		199,65		219,62		219,62		
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			80,00		88,00		96,80		106,48		117,13		117,13		
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			238,00		261,80		287,98		316,78		348,46		348,46		

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2021-2026

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA SINTANG										
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8301	6696	81%	Rp 2.726.015.000,00	Rp 2.116.617.450,00	77,6%	DAKNF - DAU - BOK	Masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan hamil dan USG, serta ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan program inovasi ANC satelit terpadu	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8238	6434	78%	Rp 71.000.000,00	Rp 52.898.000,00	74,5%	DAKNF - DAU - BOK	Masih ada pasien yang melahirkan ditolong oleh Dukun bayi dan melahirkan di rumah (Non Fasyankes)	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7934	5650	71%	Rp 8.000.000,00	Rp 7.956.480,00	99,5%	DAKNF - DAU - BOK	Masih ada bayi yang belum dilakukan pemeriksaan SHK sesuai Permenkes No 78 tahun 2014	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
4	Pelayanan Kesehatan Balita	39447	23161	59%	Rp 6.000.000,00	Rp 5.948.220,00	99,1%	DAKNF - DAU - BOK	Masih ada beberapa puskesmas yang belum menerapkan pemeriksaan sesuai MTBS, dan belum melaksanakan Kelas Ibu Balita	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	11809	10167	86%	Rp 1.523.230.000,00	Rp 878.312.000,00	57,7%	DAKNF - DAU - BOK	Masih ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan posyandu remaja	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	228806	98063	43%	Rp 6.000.000,00	Rp 5.921.850,00	98,7%	DAKNF - DAU - BOK	Belum semua Calon Pengantin yang ter skrining di Puskesmas	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	41424	35446	86%	Rp 31.353.000,00	Rp 31.091.000,00	99,2%	DAKNF - DAU - BOK	beberapa lansia mengikuti posyandu apabila ada keluhan saja dan tidak datang untuk skrining	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	65000	10911	17%	Rp 6.000.000,00	Rp 5.720.600,00	95,3%	DAKNF - DAU - BOK	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait skrining PTM	Mengusulkan anggaran untuk pertemuan penguatan Pandu PTM dan komitmen setiap puskesmas untuk melaksanakan Pandu
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1959	1937	99%	Rp 7.000.000,00	Rp 6.491.300,00	92,7%	DAKNF - DAU - BOK	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat skrining PTM	Mengusulkan anggaran untuk pertemuan penguatan Pandu PTM dan komitmen setiap puskesmas untuk melaksanakan Pandu
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	716	716	100%	Rp 963.900.000,00	Rp 633.620.000,00	65,7%	DAKNF - DAU - BOK	Kondisi iklim dan geografis yang mempersulit pasien dan keluarga pasien untuk ke FKTP	Tenaga kesehatan lebih aktif melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang berada di akses tempuh yang sulit
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	6401	4014	63%	Rp 282.924.000,00	Rp 199.900.953,00	70,7%	DAKNF - DAU - BOK	Belum tercapainya target penemuan atau penemuan kasus yang masih rendah	Melakukan Investigasi Kontak TB di masyarakat
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12090	4411	36%	Rp 6.000.000,00	Rp 5.920.000,00	98,7%	DAKNF - DAU - BOK	Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA	Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan kampanye anti stigma dan diskriminasi HIV-AIDS

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2025

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam melaksanakan SPM kesehatan, sangat penting untuk melakukan pemetaan kondisi awal SPM kesehatan di Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional. Standar nasional untuk capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Berdasarkan pemetaan kondisi awal SPM kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, adapun target pencapaian SPM kesehatan di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2025

No	Capaian Kinerja	
	Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100 %

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 2.726.015.000,00	Rp 2.116.617.450,00	77,6%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 71.000.000,00	Rp 52.898.000,00	74,5%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 8.000.000,00	Rp 7.956.480,00	99,5%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 6.000.000,00	Rp 5.948.220,00	99,1%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 1.523.230.000,00	Rp 878.312.000,00	57,7%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 6.000.000,00	Rp 5.921.850,00	98,7%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp 31.353.000,00	Rp 31.091.000,00	99,2%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 6.000.000,00	Rp 5.720.600,00	95,3%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 7.000.000,00	Rp 6.491.300,00	92,7%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Rp 963.900.000,00	Rp 633.620.000,00	65,7%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Rp 282.924.000,00	Rp 199.900.953,00	70,7%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Rp 6.000.000,00	Rp 5.920.000,00	98,7%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sintang 2025

D. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah tenaga kesehatan ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2025 sebanyak 2.058 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Medis (Dokter & Dokter spesialis)	: 161 orang
2. Psikologi Klinis	: 4 Orang
3. Bidan	: 555 orang
4. Perawat/Perawat Gigi	: 904 orang
5. Farmasi	: 79 orang
6. Gizi	: 49 orang
7. Sanitasi	: 41 orang
8. Kesehatan Masyarakat	: 63 orang
9. Teknisi Medis, All	: 202 orang

Jumlah dukungan personil diatas diambil dari tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas dan Rumah sakit di lingkungan Kabupaten Sintang.

E. HASIL CAPAIAN/REALISASI

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja SPM
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2025

No	Indikator	Jumlah yg harus terlayani 2025	Jumlah yg terlayani 2025	
			Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8301	6696	81%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8238	6434	78%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7934	5650	71%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	39447	23161	59%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11809	10167	86%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	228806	98063	43%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	41424	35446	86%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	65000	10911	17%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1959	1937	99%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	716	716	100%

11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	6401	4014	63%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12090	4411	36%

Capaian SPM Kabupaten Sintang untuk indikator pelayanan kesehatan dasar belum memenuhi target (Nasional) yaitu 100 %. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target sehingga perlu dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan dasar mencapai target. Serta diperlukannya dukungan dan kerja sama sektor-sektor terkait untuk meningkatkan capaian SPM yang sesuai target.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan hamil dan USG, serta ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan program inovasi ANC satelit terpadu	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada pasien yang melahirkan ditolong oleh Dukun bayi dan melahirkan di rumah (Non Fasyankes)	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
		Kurangnya Anggaran	Pengajuan RAB anggaran kegiatan di tahun berikutnya/melalui DAU
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	masih ada bayi yang belum dilakukan pemeriksaan SHK sesuai Permenkes No 78 tahun 2014	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
		Kurangnya Anggaran	Pengajuan RAB anggaran kegiatan di tahun berikutnya/melalui DAU
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Masih ada beberapa puskesmas yang belum menerapkan pemeriksaan sesuai MTBS, dan belum melaksanakan Kelas Ibu Balita	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
		Kurangnya Anggaran	Pengajuan RAB anggaran kegiatan di tahun berikutnya/melalui DAU
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Masih ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan posyandu remaja	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Belum semua Calon Pengantin yang ter skrining di Puskesmas	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas
		Kurangnya Anggaran	Pengajuan RAB anggaran kegiatan di tahun berikutnya/melalui DAU
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	beberapa lansia mengikuti posyandu apabila ada keluhan saja dan tidak datang untuk skrining	Melakukan Bina Wilayah dan monitoring evaluasi program puskesmas

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait skrining PTM	Mengusulkan anggaran untuk pertemuan penguatan Pandu PTM dan komitmen setiap puskesmas untuk melaksanakan Pandu
		Kurangnya Anggaran	Pengajuan RAB anggaran kegiatan di tahun berikutnya/melalui DAU
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat skrining PTM	Mengusulkan anggaran untuk pertemuan penguatan Pandu PTM dan komitmen setiap puskesmas untuk melaksanakan Pandu
		Kurangnya anggaran	Meningkatkan anggaran untuk DM melalui usulan anggaran dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Kondisi iklim dan geografis yang mempersulit pasien dan keluarga pasien untuk ke FKTP	Tenaga kesehatan lebih aktif melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang berada di akses tempuh yang sulit
		Kurangnya kesadaran pasien dan keluarga dalam mengikuti program yang dilanjutkan oleh FKTP seperti tidak hadir saat diadakan penyuluhan FKTP	Tenaga kesehatan lebih giat dalam melaksanakan penyuluhan
		Tidak disiplin dalam pengawasan minum obat yang dilakukan oleh keluarga	Tenaga kesehatan lebih aktif memonitor dalam pengawasan minum obat pasien
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Belum tercapainya target penemuan atau penemuan kasus yang masih rendah	Melakukan Investigasi Kontak TB di masyarakat
			Penyuluhan ke masyarakat tentang bahaya TB
			Bimbingan program TB ke puskesmas utk meningkatkan capaian penemuan
			Evaluasi pelaksanaan program TB di Kabupaten

			Melalui pertemuan desa dan rebug desa membahas upaya Eliminasi TB dengan dukungan dana, dukungan pemerintahan desa, dukungan tokoh masyarakat, dukungan tokoh Adat dan tokoh agama.
		- Belum tercapainya target kesembuhan	Meningkatkan peran petugas puskesmas dan Pustu untuk mengawasi penderita TB saat pengobatan
			Meningkatkan dan membentuk Pengawas Minum Obat (PMO) di Masyarakat
			Peningkatan akses obat TB
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Immunodeficiency Virus	Masalah Internal	
		Kurangnya koordinasi antara unit kerja terkait seperti puskesmas, Rumah sakit, dan fasilitas pelayanan HIV lainnya	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait
			Memanfaatkan setiap pertemuan bersama OPD terkait, dengan menyampaikan permasalahan program HIV-AIDS
		Kurangnya sumber sumberdaya manusia (SDM)	Meningkatkan kapasitas SDM, dengan memanfaatkan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dan dedikasi SDM dalam melaksanakan program HIV-AIDS.
			Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang HIV-AIDS

		Kurangnya anggaran	Meningkatkan anggaran untuk HIV-AIDS melalui usulan anggaran dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
		Masalah Eksternal	
		Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA	Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan kampanye anti stigma dan diskriminasi HIV-AIDS
		Persepsi masyarakat yang masih rendah tentang HIV-AIDS	Meningkatkan promosi kesehatan melalui sosialisasi HIV-AIDS di sekolah, RRI, berbagai media lainnya.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Laporan Kegiatan pelayanan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang beresiko tinggi yang dilayani jampersal
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia dasar	Sekolah yang dibina UKS dan kader kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif
		Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Laporan kegiatan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Laporan pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV

BAB V

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar kesehatan, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sintang Tahun 2025 ini disusun agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang diharapkan dapat terwujud.